

RANCANGAN RENJA 2026

RENCANA KERJA DINAS KOMINFO KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan hidayah-Nya, Rancangan Rencana Kerja (RANCANGAN RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2026 ini menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sekaligus sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD).

Kami berharap Rancangan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berguna dalam pencapaian target pembangunan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 28 November 2024



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

JOAN PRAYUDA, SE., MM

Pembina Tk.I (IV/b)

19810829 201001 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

 1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

DAN PREDIKSI TAHUN BERJALAN 7

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 7

 2.2 Prediksi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

 Tahun 2024 12

 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 27

 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 32

 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 32

 3.2 Sinkronisasi Program Antara RPJM, RENSTRA dan RKA 33

 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 41

 4.1 Program dan Kegiatan..... 41

 4.2 Rumusan Rencana Pendanaan..... 45

BAB V PENUTUP..... 66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANCANGAN RENJA-PD) Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra OPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, serta menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rancangan Renja 2026 dimulai dengan persiapan penyusunan, mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun sebelumnya dan tahun berjalan akan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan RKPD yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada Rancangan RKPD;
- b. Rumusan program / kegiatan di dalam Rancangan Renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;

- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rancangan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD;
- d. Rumusan program / kegiatan didalam Rancangan Renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran dan total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Rancangan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD yang menjadi acuannya. Rancangan Renja Perangkat Daerah memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD, RTRW dan RPJPD. Sebaliknya Rancangan Renja Perangkat Daerah dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, KUA-PPAS dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

- Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola an Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021);
 21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021).
 22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi pada tahun 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengevaluasi RENJA Dinas Kominfo tahun sebelumnya;
2. Sebagai salah satu acuan penyusunan program dan kegiatan Dinas Kominfo tahun 2026;
3. Merencanakan program dan kegiatan Dinas Kominfo tahun 2026;
4. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kominfo tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Kominfo Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN PREDIKSI TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

	2.2	Prediksi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026
	2.3	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
	2.4	Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB III		TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
	3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2	Sinkronisasi Program Antara RPJMD, RENJA dan RKA
	3.3	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV		RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	4.1	Program dan Kegiatan
	4.2	Rumusan Rencana Pendanaan
BAB V		PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN PREDIKSI

TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (Kondisi per Bulan Oktober 2024)

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/ atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan ditinjau dari Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 (Bulan Desember 2024)

NO.		URAIAN			Sudah / Belum Mencapai Target
1.	PROGRAM	PENUNJANG	URUSAN	PEMERINTAHAN	DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Tercapai
	Anggaran	20.300.000			
	Realisasi	20.300.000			
	Persentase Realisasi	100%			
2.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tercapai
	Anggaran	58.850.000			
	Realisasi	57.850.000			
	Persentase Realisasi	98,30%			
3.	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tercapai
	Anggaran	29.200.000			
	Realisasi	29.000.000			
	Persentase Realisasi	99,61%			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tercapai
	Anggaran	3.302.752.349			
	Realisasi	3.018.064.587			
	Persentase Realisasi	91,38%			
5.	Sub Kegiatan	Penyediaan	Administrasi	Pelaksana	Tercapai
		Tugas ASN			
	Anggaran	229.200.000			
	Realisasi	229.200.000			

	Persentase Realisasi	100%	
6.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapai
	Anggaran	44.240.000	
	Realisasi	44.200.000	
	Persentase Realisasi	99,91%	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
7.	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tercapai
	Anggaran	60.000.000	
	Realisasi	58.900.000	
	Persentase Realisasi	98,17%	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
8.	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapai
	Anggaran	4.463.750	
	Realisasi	4.383.000	
	Persentase Realisasi	98,19%	
9.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapai
	Anggaran	62.153.000	
	Realisasi	57.318.858	
	Persentase Realisasi	92,22%	
10.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercapai
	Anggaran	16.010.000	
	Realisasi	15.537.900	
	Persentase Realisasi	97,05%	
11.	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapai
	Anggaran	21.800.000	
	Realisasi	21.379.000	
	Persentase Realisasi	98,07%	
12.	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercapai
	Anggaran	6.000.000	
	Realisasi	6.000.000	
	Persentase Realisasi	100%	
13.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapai
	Anggaran	559.482.200	
	Realisasi	557.131.214	
	Persentase Realisasi	99,58%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
14.	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapai

	Anggaran	51.063.000	
	Realisasi	50.863.000	
	Persentase Realisasi	99,61%	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
15.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapai
	Anggaran	3.500.000	
	Realisasi	3.500.000	
	Persentase Realisasi	100%	
16.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapai
	Anggaran	88.877.000	
	Realisasi	88.770.999	
	Persentase Realisasi	99,88%	
17.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapai
	Anggaran	96.000.000	
	Realisasi	87.244.871	
	Persentase Realisasi	90,88%	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
18.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapai
	Anggaran	173.710.400	
	Realisasi	172.272.670	
	Persentase Realisasi	99,17%	
19.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapai
	Anggaran	36.270.000	
	Realisasi	36.040.000	
	Persentase Realisasi	99,73%	
20.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapai
	Anggaran	158.955.000	
	Realisasi	157.515.112	
	Persentase Realisasi	99,09%	
2.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			
21.	Sub Kegiatan	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Belum Tercapai
	Anggaran	51.315.000	
	Realisasi	30.600.000	
	Persentase Realisasi	59,63%	
22.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tercapai

	Anggaran	115.600.000		
	Realisasi	115.600.000		
	Persentase Realisasi	100%		
23.	Sub Kegiatan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Tercapai
	Anggaran	44.320.000		
	Realisasi	42.600.000		
	Persentase Realisasi	96,12%		
24.	Sub Kegiatan	Pelayanan Informasi Publik		Tercapai
	Anggaran	49.020.000		
	Realisasi	45.900.000		
	Persentase Realisasi	93,64%		
25.	Sub Kegiatan	Layanan Hubungan Media		Tercapai
	Anggaran	2.652.650.000		
	Realisasi	2.608.157.344		
	Persentase Realisasi	98,32%		
26.	Sub Kegiatan	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Tercapai
	Anggaran	400.290.000		
	Realisasi	396.030.000		
	Persentase Realisasi	98,94%		
27.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Tercapai
	Anggaran	52.916.000		
	Realisasi	51.136.000		
	Persentase Realisasi	96,64%		
3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
28.	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Tercapai
	Anggaran	2.667.683.000		
	Realisasi	2.667.410.000		
	Persentase Realisasi	99,99%		
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
29.	Sub Kegiatan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Tercapai
	Anggaran	95.000.000		
	Realisasi	95.000.000		
	Persentase Realisasi	100%		
30.	Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Tercapai
	Anggaran	70.100.000		
	Realisasi	70.000.000		

	Persentase Realisasi	99,86%			
31.	Sub Kegiatan	Pengelolaan e-Government Chief Information Officer (GCIO)			Tercapai
	Anggaran	53.800.000			
	Realisasi	50.940.000			
	Persentase Realisasi	94,68%			
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
32.	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektora			Tercapai
	Anggaran	82.600.000			
	Realisasi	82.400.000			
	Persentase Realisasi	99,76%			
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
33.	Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Tercapai
	Anggaran	47.350.000			
	Realisasi	45.750.000			
	Persentase Realisasi	96,62%			

Review atas pelaksanaan program dan kegiatan diatas memperlihatkan bahwa mayoritas pelaksanaan program/ kegiatan telah mencapai target realisasi di atas 75%, walaupun masih terdapat satu sub kegiatan yang pencapaian realisasi keuangannya berada dibawah 60%.

- Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik. Serapan anggaran: 59,63%
 Alasan: Belum terlaksananya secara maksimal kegiatan SP4N-LAPOR yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggeser anggaran pada beberapa kegiatan yang anggarannya berupa honorarium tim pelaksana kegiatan. Program atau kegiatan dapat tercapai sesuai anggaran namun pencapaian target Perjanjian Kinerja OPD tidak Optimal, sehingga dilakukan perubahan target.

2.2 Prediksi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A.1 Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Prediksi : 100%

Anggaran : 20.580.000

A.2 Sub Kegiatan

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Prediksi : 100%

Anggaran : 59.795.000

A.3 Sub Kegiatan:

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Prediksi : 100%

Anggaran : 29.160.000

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

B.1 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Prediksi : 100%

Anggaran : 3.294.621.843

B.2 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Prediksi : 100%

Anggaran : 230.400.000

B.3 Sub Kegiatan:

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Prediksi : 100%

Anggaran : 44.400.000

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

C.1 Sub Kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Prediksi : 100%

Anggaran : 60.900.000

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

D.1 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Prediksi : 100%
Anggaran : 4.393.500

D.2 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Prediksi : 100%
Anggaran : 62.024.000

D.3 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Prediksi : 100%
Anggaran : 16.477.350

D.4 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Prediksi : 100%
Anggaran : 19.450.000

D.5 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Prediksi : 100%
Anggaran : 5.000.000

D.6 Sub Kegiatan:

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Prediksi : 100%
Anggaran : 457.611.400

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

E.1 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Prediksi : 100%
Anggaran : 3.000.000

E.2 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Prediksi : 100%
Anggaran : 84.984.000

E.3 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Prediksi : 100%
Anggaran : 92.379.200

F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

F.1 Sub Kegiatan:

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Prediksi : 100%

Anggaran : 11.800.000

G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

G.1 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

Prediksi : 100%

Anggaran : 177.338.000

F.2 Sub Kegiatan:

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Prediksi : 100%

Anggaran : 30.830.000

F.3 Sub Kegiatan:

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Prediksi : 100%

Anggaran : 24.000.000

2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Kegiatan:

A. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

A.1 Sub Kegiatan:

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Prediksi : 100%

Anggaran : 50.932.000

A.2 Sub Kegiatan:

- Penyusunan Konten

Prediksi : 100%

Anggaran : 172.136.000

A.3 Sub Kegiatan:

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Prediksi : 100%

Anggaran : 44.384.000

A.4 Sub Kegiatan:

- Pelayanan Informasi Publik

Prediksi : 100%

Anggaran : 49.170.000

A.5 Sub Kegiatan:

- Relasi Media
Prediksi : 100%
Anggaran : 2.418.550.000

A.6 Sub Kegiatan:

- Diseminasi Informasi
Prediksi : 100%
Anggaran : 278.490.000

A.7 Sub Kegiatan:

- Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
Prediksi : 100%
Anggaran : 53.042.000

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan:

A. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

A.1 Sub Kegiatan:

- Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
Prediksi : 100%
Anggaran : 53.800.000

A.2 Sub Kegiatan:

- Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
Prediksi : 100%
Anggaran : 95.000.000

A.3 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
Prediksi : 100%
Anggaran : 2.716.344.000

A.4 Sub Kegiatan:

- Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
Prediksi : 100%
Anggaran : 70.099.800

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan:

A. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

A.1 Sub Kegiatan:

- Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

Prediksi : 100%

Anggaran : 36.285.000

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan:

A. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

A.1 Sub Kegiatan:

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Prediksi : 100%

Anggaran : 46.980.000

Tabel 2.2
Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Periode Pelaksanaan : 1 Oktober s.d 31 Desember 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021-2023)	Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)	unit Perangkat daerah yang bertanggung Jawab						
							I		II		III		IV											
							1	2	3	4	5	6	7	8										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 + 13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD	600 %	114.824.711.401	300%	30.744.869.978	100%	11.405.470.699	11,62 %	1.324.788.748	31,57 %	3.600.482.475	19,77 %	2.254.435.780	33,64 %	3.837.287.652	96,59 %	11.016.994.655	396,59 %	41.761.864.633	66%	36,37 %	Diskominfo
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, akuntabilitas kinerja aparatur dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD	600 %	37.456.037.551	300%	14.357.885.818	100%	5.022.826.699	15,81 %	794.018.748	31,45 %	1.579.832.381	21,17 %	1.063.560.780	25,45 %	1.278.059.402	93,88 %	4.715.471.311	393,88 %	19.073.357.129	66%	50,92 %	Diskominfo
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		600 %	666.520.000	300%	127.127.250	100%	108.350.000	23,49 %	25.450.000	29,26 %	31.700.000	18,00 %	19.500.000	28,15%	30.500.000	98,89 %	107.150.000	398,89 %	234.277.250	66%	35,15 %	Diskominfo
		Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Renja, RKA, RKAP, Lakip dan Laporan kegiatan akhir tahun	30	371.520.000	10	127.127.250	5	58.850.000	1	14.950.000	2	18.900.000	1	9.000.000	1	15.000.000	5	57.850.000	15	184.977.250	50%	49,79 %	Diskominfo

		Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	120.000.000	0	-	2	20.300.000	1	4.500.000	1	6.800.000	1	4.500.000	1	4.500.000	4	20.300.000	4	20.300.000	40%	16,92 %	Diskominfo
		Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	175.000.000	4	34.000.000	4	29.200.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	11.000.000	4	29.000.000	8	63.000.000	50%	36,00 %	Diskominfo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		600 %	24.743.464.894	300%	11.238.974.846	100%	3.576.192.349	15,54 %	555.592.549	30,17 %	1.078.831.162	21,68 %	775.206.718	24,66 %	881.834.158	92,04 %	3.291.464.587	392,04 %	14.530.439.433	65%	58,72 %	Diskominfo
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	72	23.308.044.894	24	10.624.024.946	12	3.302.752.349	3	492.142.549	3	1.006.681.162	3	707.406.718	3	811.834.158	12	3.018.064.587	36	13.642.089.533	50%	58,53 %	Diskominfo
		Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	960.320.000	24	477.400.000	12	229.200.000	3	52.950.000	3	61.650.000	3	57.300.000	3	57.300.000	12	229.200.000	36	706.600.000	300%	73,58 %	Diskominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja program dan kegiatan	10	275.100.000	4	137.549.900	2	44.240.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	12.700.000	4	44.200.000	8	181.749.900	80%	66,07 %	Diskominfo
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0%	0,00%	Diskominfo	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		600 %	582.500.000	300%	51.000.000	100%	60.000.000	0,00%	-	98,17 %	0,00%	0,00%	-	98,17 %	-	58.900.000	398,17 %	109.900.000	66%	18,87 %	Diskominfo	

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	60	157.500.000	120	51.000.000	60	60.000.000	0	-	58	58.900.000	0	-	0	-	58	58.900.000	178	109.900.000	297%	69,78 %	Diskominfo
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tercapainya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	175.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%	Diskominfo
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%	Diskominfo
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	600 %	5.027.621.692	300%	1.802.590.292	100%	669.908.950	17,64 %	118.140.477	28,05 %	187.937.461	24,02 %	160.917.397	29,07 %	194.754.637	98,78 %	661.749.972	398,78 %	2.464.340.264	66%	49,02 %	Diskominfo
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terbayarnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8	28.044.106	16	11.044.007	8	4.463.750	3	2.108.000	0	-	5	2.275.000	0	-	8	4.383.000	24	15.427.007	300%	55,01 %	Diskominfo
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	50	255.000.027	100	121.349.791	50	62.153.000	20	27.522.158	0	-	30	29.796.700	0	-	50	57.318.858	150	178.668.649	300%	70,07 %	Diskominfo
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	2	131.400.000	140	42.200.000	2	16.010.000	1	1.200.000	1	11.497.900	1	1.380.000	1	1.460.000	4	15.537.900	144	57.737.900	7200 %	43,94 %	Diskominfo
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8	131.561.532	16	62.031.144	8	21.800.000	0	-	4	15.596.000	4	5.763.000	0	-	8	21.379.000	24	83.410.144	300%	63,40 %	Diskominfo

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7	45.000.000	14	18.000.000	7	6.000.000	0	-	0	-	0	7	6.000.000	7	6.000.000	21	24.000.000	300%	53,33 %	Diskominfo
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	12	4.316.616,027	24	1.547.965.350	12	559.482.200	3	87.310.319	3	160.843.561	3	121.682.697	187.294.637	12	557.131.214	36	2.105.096.564	300%	48,77 %	Diskominfo
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%	Diskominfo
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		600 %	2.925.000.000	300%	255.419.626	0,00 %	51.063.000	0,00%	-	62,01 %	0,00%	-	37,60 %	19.200.000	99,61 %	50.863.000	399,61 %	306.282.626	67%	10,47 %	Diskominfo
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15	700.000.000	3	66.652.900	15	51.063.000	0	-	10	31.663.000	0	5	19.200.000	15	50.863.000	18	117.515.800	120%	16,79 %	Diskominfo
		Pengadaan Mebel		25	225.000.000	14	23.294.726	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	14	23.294.726	56%	10,35 %	Diskominfo
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	1.200.000.000	1	18.472.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	1	18.472.000	100%	1,54%	Diskominfo
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20	800.000.000	3	30.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	3	30.000.000	15%	3,75%	Diskominfo
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		600 %	718.211.265	300%	345.527.530	100%	188.377.000	22,16 %	41.736.447	24,04 %	26,34 %	22,76 %	95,30 %	42.872.612	95,30 %	179.515.970	395,30 %	525.043.500	66%	73,10 %	Diskominfo

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	23.700.000	24	8.550.000	12	3.500.000	3	1.050.000	3	1.050.000	3	1.035.811	3	364.189	12	3.500.000	36	12.050.000	300%	50,84 %	Diskominfo
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	479.000.000	24	235.200.000	12	96.000.000	3	21.936.447	3	20.485.246	3	22.629.855	3	22.183.423	12	87.244.971	36	322.444.971	300%	67,32 %	Diskominfo
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	215.511.265	24	101.777.530	12	88.877.000	3	18.750.000	3	23.737.000	3	25.958.999	3	20.325.000	12	88.770.999	36	190.548.529	300%	88,42 %	Diskominfo
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		600 %	2.792.719.700	300%	792.665.900	100%	368.935.400	14,39 %	53.099.275	39,44 %	145.518.512	15,81 %	29,52 %	58.312.000	108.897.995	99,16 %	365.827.782	399,16 %	1.158.493.682	67%	41,48 %	Diskominfo
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelancaran Kegiatan Organisasi	20	878.850.000	19	449.041.000	20	173.710.400	4	35.457.000	7	65.713.670	5	41.812.000	4	29.290.000	20	172.272.670	39	621.313.670	195%	70,70 %	Diskominfo
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelancaran Kegiatan Organisasi	30	218.081.700	44	95.628.900	30	36.270.000	6	6.700.000	10	14.340.000	9	10.500.000	5	4.500.000	30	36.040.000	74	131.668.900	247%	60,38 %	Diskominfo
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelancaran Kegiatan Organisasi	1	1.695.788.000	1	247.986.000	1	158.955.000	1	10.942.275	1	65.464.842	1	6.000.000	1	75.107.995	4	157.515.112	5	405.511.112	500%	23,91 %	Diskominfo

2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		600 %	49.566.283.850	300%	9.754.884.500	100%	3.366.111.000	12,49 %	420.530.000	36,14 %	1.216.450.094	14,20 %	478.110.000	34,90 %	1.174.933.250	97,74 %	3.290.023.344	397,74 %	13.044.907.844	66%	26,32 %	Diskominfo
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		600 %	49.566.283.850	300%	9.754.884.500	100%	3.366.111.000	12,49 %	420.530.000	36,14 %	1.216.450.094	14,20 %	478.110.000	34,90 %	1.174.933.250	97,74 %	3.290.023.344	397,74 %	13.044.907.844	66%	26,32 %	Diskominfo
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	terbangunnya citra pemerintah kabupaten tanjung jabung barat melalui opini publik	4	337.875.000	4	127.375.000	4	51.315.000	1	7.650.000	1	7.650.000	1	7.650.000	1	7.650.000	4	30.600.000	8	157.975.000	200%	46,76 %	Diskominfo
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	40	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0%	0,00%	Diskominfo	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyiaran	4	385.100.000	4	118.300.000	4	44.320.000	1	10.650.000	1	10.650.000	1	10.650.000	1	10.650.000	4	42.600.000	8	160.900.000	200%	41,78 %	Diskominfo
		Pelayanan Informasi Publik	Ketersediaan informasi dan meningkatnya layanan informasi publik	4	294.818.000	4	133.452.000	4	49.020.000	1	11.475.000	1	11.475.000	1	11.475.000	1	11.475.000	4	45.900.000	8	179.352.000	200%	60,83 %	Diskominfo
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	4	250.000.000	4	54.999.800	4	52.916.000	1	6.975.000	1	6.975.000	1	6.975.000	1	30.211.000	4	51.136.000	8	106.135.800	200%	42,45 %	Diskominfo

		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	40	600.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0%	0,00%	Diskominfo		
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	TerselenggaranyaPengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	553.800.000	3	109.200.000	4	115.600.000	1	28.650.000	1	28.650.000	1	28.650.000	4	115.600.000	7	224.800.000	58%	40,59%	Diskominfo		
		Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya Layanan Hubungan Media	4	41.847.000.000	4	7.682.950.000	4	2.652.650.000	1	286.650.000	1	1.029.200.094	1	359.650.000	4	2.608.157.344	8	10.291.107.344	200%	24,59%	Diskominfo		
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Fasilitasi kemitraan layanan komunikasi publik	2.590	3.824.290.850	500	1.248.607.700	500	400.290.000	120	68.480.000	140	121.850.000	110	53.060.000	130	152.640.000	500	396.030.000	1000	1.644.637.700	39%	43,01%	Diskominfo
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	8	240.000.000	0		0		0		0		0		0		0		0%	0,00%	Diskominfo		
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kota		600%	1.233.400.000	0,00%	280.000.000	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0%	22,70%	Diskominfo		
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7	1.233.400.000	0	280.000.000	0		0		0		0		0		0		0%	22,70%	Diskominfo		

3		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		600 %	22.627.390.000	300%	6.191.475.320	100%	2.886.583.000	3,24%	93.440.000	25,55 %	737.600.000	24,11 %	695.965.000	46,99 %	1.356.345.000	99,89 %	2.883.350.000	399,89 %	9.074.825.320	67%	40,11 %	Diskominfo
		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	264	19.021.790.000	44	6.191.475.320	44	2.886.583.000	3,24%	93.440.000	25,55 %	737.600.000	24,11 %	695.965.000	46,99 %	1.356.345.000	99,89 %	2.883.350.000	399,89 %	9.074.825.320	2%	47,71 %	Diskominfo
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tercapainya pengembangan, pemeliharaan telematika dan jaringan telekomunikasi	44	19.021.790.000	44	5.138.205.720	44	2.667.683.000	44	46.000.000	44	649.500.000	44	664.465.000	44	1.307.445.000	176	2.667.410.000	220	7.805.615.720	500%	41,04 %	Diskominfo
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		600 %	3.605.600.000	300%	854.904.314	100%	218.900.000	21,67 %	47.440.000	40,25 %	88.100.000	14,39 %	31.500.000	22,34 %	48.900.000	98,65 %	215.940.000	398,65 %	1.070.844.314	66%	29,70 %	Diskominfo
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan	4	800.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	44	-	44	-	1100 %	0,00%	Diskominfo	
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang menyampaikan Data di Aplikasi Satu Data	44	281.100.000	0	46.850.000	0	-	0	-	0	0	0	-	0	44	-	44	-	100%	16,67 %	Diskominfo	
		Kordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Tercapainya Kordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	44	286.200.000	44	61.700.000	0	-	0	-	0	0	0	-	0	13	-	57	-	130%	21,56 %	Diskominfo	

		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	44	1.155.100.000	44	439.420.000	44	95.000.000	44	22.500.000	44	22.500.000	44	27.500.000	176	95.000.000	220	534.420.000	500%	46,27 %	Diskominfo
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanjab Barat	44	669.600.000	44	349.899.800	44	70.100.000	44	4.000.000	44	58.000.000	44	3.000.000	176	70.000.000	220	419.899.800	500%	62,71 %	Diskominfo
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tersedianya Portal Perangkat Daerah yang handal dan mutakhir	44	413.600.000	44	155.399.800	44	53.800.000	44	20.940.000	44	7.600.000	44	6.000.000	176	50.940.000	220	206.339.800	500%	49,89 %	Diskominfo
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		600 %	1.250.000.000	300%	82.200.000	100%	82.600.000	7,45%	6.150.000	67,74 %	55.950.000	7,45%	6.150.000	17,13 %	14.150.000	399,76 %	164.600.000	67%	13,17 %	Diskominfo
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya OPD Penyelenggara Statistik Sektoral	600 %	1.250.000.000	300%	82.200.000	100%	82.600.000	7,45%	6.150.000	67,74 %	55.950.000	7,45%	6.150.000	17,13 %	14.150.000	399,76 %	164.600.000	67%	13,17 %	Diskominfo
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	44	1.250.000.000	44	82.200.000	44	82.600.000	44	6.150.000	44	55.950.000	44	6.150.000	176	82.400.000	220	164.600.000	500%	13,17 %	Diskominfo
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGEMASAN INFOMASI		600 %	1.000.000.000	300%	103.004.714	100%	47.350.000	22,49 %	10.650.000	22,49 %	10.650.000	22,49 %	13.800.000	96,62 %	45.750.000	396,62 %	148.754.714	66%	14,88 %	Diskominfo

		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	600 %	1.000.000.000	300%	103.004.714	100%	47.350.000	22,49 %	10.650.000	22,49 %	10.650.000	22,49 %	10.650.000	29,14 %	13.800.000	96,62 %	45.750.000	396,62 %	148.754.714	66%	14,88 %	Diskominfo
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	44	500.000.000	44	103.004.714	44	47.350.000	44	10.650.000	44	10.650.000	44	10.650.000	44	13.800.000	176	45.750.000	220	148.754.714	500%	29,75 %	Diskominfo
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	13	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%	Diskominfo
		Rata-rata capaian kinerja (%)																66,26 %						
		Predikat Kinerja																Sedang						

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Renja tahun 2026 merupakan tahun kedua perencanaan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029. Prioritas pencapaian sasaran pembangunan daerah disusun secara seksama mengingat banyaknya program yang harus dijalankan dengan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah.

Pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025 sebagian besar sesuai dengan Renja Dinas Kominfo Tahun 2025 dan secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Tabel 2.3
Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Tata kelola Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi, Keterbukaan Informasi, serta Pelayanan Publik yang Transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	75	80	84	86	90	95
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	82	85	88	90	92
	Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	70%	75%	75%	80%	80%	80%
	Terselenggaranya Layanan Pemerintah Secara Digital	Indeks SPBE	2,95	3,00	3,05	3,10	3,25	3,35
	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,23	2,35	2,35	2,50	2,50	2,60
	Meningkatnya Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	40%	47%	54%	63%	67%	70%

Dari sasaran yang ditetapkan dalam pengimplementasiannya pada sasaran strategis dengan formulasi sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah memiliki 2 indikator diantaranya Nilai AKIP OPD dan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah
 - a. Nilai dari AKIP OPD diperoleh dari hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah/Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - b. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran komprehensif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, yang bertujuan untuk menilai kinerja penyelenggara layanan dan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.
2. Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) adalah
 - a. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah penetapan nilai indikator dilakukan dengan memanfaatkan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai ini diperoleh melalui proses survei yang dilakukan oleh Diskominfo Tanjung Jabung Barat melalui penyelenggara survei sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Terselenggaranya Layanan Pemerintah Secara Digital adalah
 - a. Perhitungan indeks SPBE adalah Perbandingan antara Jumlah Jumlah OPD yg menggunakan aplikasi SPBE dengan Jumlah Jumlah OPD Kab. Tanjab Barat dikali seratus persen. Untuk lebih jelas berikut formulasinya :

Jumlah OPD yg menggunakan aplikasi SPBE

Jumlah OPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

X 100%

4. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintah adalah
 - a. Indeks Pembangunan Statistik adalah Perbandingan antara Total Nilai dasar persepsi per unsur dengan Total unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang. Untuk lebih jelas berikut formulasinya :

Total dari nilai persepsi per unsur

Total unsur yang terisi

X 100%

5. Meningkatnya Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi adalah
 - a. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah adalah Jumlah Seranagn Siber per jumlah seranagn siber yang teratasi dikali seratus persen.

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Analisis isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas untuk melengkapi tahapantahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identitas isu penting dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu penting ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi.

2.4.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat sampai tahun 2024, masih belum dikatakan dapat tercapai semua nya. Hal ini terjadi karena masih sedikitnya dukungan anggaran dari Pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta kurangnya SDM yang berkemampuan dalam urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.

2.4.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat dilihat berdasarkan masing-masing urusan yaitu:

a. Urusan Komunikasi dan Informasi

- 1) Masih kurangnya SDM yang berkompeten dalam bidang komunikasi dan informatika.
- 2) Pengelolaan E-Government yang belum optimal.
- 3) Banyaknya aplikasi pemerintah yang belum terintegrasi dan belum terkelola dengan baik.
- 4) Terbatasnya jumlah titik hotspot internet publik area.
- 5) Fungsi PPID pada setiap OPD yang belum optimal.
- 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik yang memadai.
- 7) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan informasi daerah dan komunikasi publik.
- 8) Belum optimalnya pengelolaan layanan monitoring isu publik di media.

b. Urusan Statistik

- 1) Belum optimalnya pengelolaan statistik sektoral.
- 2) Belum terbangunnya sistem big data.
- 3) Belum tersedianya tenaga yang berkompeten di bidang statistik.
- 4) Masih kurangnya masyarakat yang memanfaatkan statistik sektoral.

c. Urusan Persandian

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam penyampaian informasi yang bersifat rahasia.
- 2) Kurangnya peralatan untuk persandian dalam mengamankan informasi.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan pengamanan informasi.
- 4) Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang persandian atau pengamanan informasi.

2.4.3 Dampak Terhadap Capaian Pemerintah Pusat dan Daerah

Dampak dari hambatan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tanjung Jabung Barat terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah belum tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat. Sehingga membuat misi yang ditetapkan Kepala Daerah belum tercapai. Selain itu hambatan juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian program Pemerintah Pusat. Hal ini terjadi karena capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan SPM dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang harus didukung oleh Pemerintah Daerah.

2.4.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan:

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem aplikasi dalam menerapkan E-Government.
2. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten secara terintegrasi.
3. Penyebaran informasi kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel.
4. Kesenjangan kemampuan TIK Masyarakat.
5. Jaminan keamanan sistem TIK

Peluang:

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi dari Kemenkominfo RI tentang TIK.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK.
3. Partisipasi masyarakat pada pelatihan di bidang TIK untuk meningkatkan kemampuan SDM.
4. Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.

5. Penyelenggaraan statistik sektoral.
6. Penerapan fungsi GPR (government public relations).
7. Edukasi internet sehat dan aman, kreatif dan produktif.
8. Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah.
9. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

2.4.5 Penentuan Isu-Isu Penting

Isu penting merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu penting yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya aplikasi e-government yang belum terintegrasi dan belum terkelola dengan baik.
2. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
4. Belum optimalnya penyediaan statistik sektoral.
5. Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam penyampaian informasi yang bersifat rahasia.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai hubungan nasional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendukung keberhasilan pembangunan Nasional secara keseluruhan. Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Digital mengacu pada Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Kabinet Merah Putih membawa visi besar untuk menjadikan Indonesia mandiri dan maju di era digital melalui program transformasi sesuai Asta Cita. Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur digital yang merata hingga ke pelosok tanah air, sebagai langkah strategis untuk menghapus kesenjangan digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah ini diiringi dengan digitalisasi data untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan koordinasi antar lembaga, yang menjadi landasan pemerintahan berbasis digital yang transparan dan akuntabel. Di sektor ekonomi, digitalisasi menjadi fokus utama untuk mendukung kemandirian bangsa, terutama dengan meningkatkan inovasi teknologi seperti pertanian digital dan platform pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan sumberdaya manusia unggul melalui program literasi digital dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan serta industri. Inovasi digital juga dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya Indonesia secara global, menjaga identitas nasional, dan menciptakan ekosistem digital yang kompetitif. Melalui visi ini, Kabinet Merah Putih menegaskan komitmennya menjadikan digitalisasi sebagai motor penggerak kemandirian bangsa di era teknologi.

VISI Kementerian Komunikasi dan Digital fokus program presiden yang selaras dengan Kemenkominfo yaitu Sistem Pemerintahan yang Efisien dan Akuntabel: Dengan reformasi birokrasi, diharapkan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, cepat, dan akuntabel, serta memperkuat kepercayaan publik. Harapan ini didorong oleh misi mereka untuk meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik dan memastikan bahwa pemerintah melayani kepentingan rakyat.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia yang berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.
2. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dari sasaran-sasaran tersebut maka arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital RI yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penggunaan TIK sebagai pendukung utama sektor strategis nasional. Dalam hal ini kaitannya dengan penyediaan infrastruktur internet publik dan peningkatan sarana dan prasarana TIK untuk masyarakat.
2. Mendorong pemanfaatan TIK sebagai enabler pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemberdayaan TIK bagi UMKM, petani dan nelayan. Dalam hal ini memajukan perekonomian masyarakat yang lebih inovatif dan berteknologi tinggi melalui penggunaan sarana dan prasarana TIK.
3. Pengembangan dan pemberdayaan aplikasi e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pariwisata, e-logistik, e-pendidikan, dan etransportasi. Hal ini kaitannya dengan kebijakan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat menuju Tanjung Jabung Barat Smart City.
4. Menyebarkan pada publik narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini berkaitan dengan penyampaian berita atau informasi publik mengenai kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat melalui media dan website resmi pemerintah.
5. Menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Dalam hal ini berkaitan dengan data-data sektoral Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat yang disusun dalam sebuah dokumen.
6. Menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat memanfaatkan wadah yang ada di masyarakat melalui pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

3.2 Sinkronisasi Program Antara RPJMD, RENJA dan RKA

Upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kab. Tanjung Jabung Barat priode 2025 s.d 2029 yaitu Menuju Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis

dan Mandiri Berinovasi). Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung **Misi II** yaitu: Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk mencapai misi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa program. Adapun program yang disusun selaras antara RPJMD, RENJA dan RKA untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sinkronisasi Program, Indikator dan Target RPJMD, RENJA dan RKA Tahun 2026

VISI : MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis dan Mandiri Berinovasi).

MISI II : Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

No.	Program RPJMD	Indikator	Target Kinerja	Program Renja	Indikator	Target Kinerja	Program RKA	Indikator	Target Kinerja
Sasaran Strategis: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima dan adaptif									
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	75%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	75%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	75%
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	3,05	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	3,05	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	3,05
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,35	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,35	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,35
4.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengam anan Informasi Pemerintah Daerah	54%	Program Penyelenggaraann Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengam anan Informasi Pemerintah Daerah	54%	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengam anan Informasi Pemerintah Daerah	54%

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan uraian dan implementasi dari misi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dapat disampaikan sebagai berikut: Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang 5 (lima) tahun ke depan. Untuk itu, *impact* harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sasaran adalah penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur, untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan sistem informasi melalui pendidikan dan pelatihan teknologi informasi.
2. Terselenggaranya penyediaan jaringan interkoneksi pada OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Meningkatnya layanan informasi pembangunan daerah (SIMDA) yang handal, berdaya dan berhasil guna yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi berbasis website, audio dan audio visual dengan dukungan pendanaan yang memadai.
5. Meningkatnya diseminasi data statistik sektoral dan mutu statistik daerah yang terintegrasi
6. Tersedianya layanan keamanan informasi pemerintahan berbasis elektronik dan non elektronik.

Untuk mencapai tujuan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Membangun Jaringan Komunikasi data antar OPD dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Meningkatkan jumlah OPD dalam Kab. Tanjung Jabung Barat terhubung jaringan internet
3. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

4. Mengembangkan dan menyelenggarakan system pelayanan informasi publik
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di Kab. Tanjung Jabung Barat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media.
8. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Bidang TIK

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target RENJA Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaras dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target RENSTRA.

Tabel 3.2
 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kominfo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA 2026	TARGET RENJA 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi, Keterbukaan Informasi, serta Pelayanan Publik yang Transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP OPD (Angka)	80	80
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82	82
		Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	72%	72%
		Terselenggaranya Layanan Pemerintah Secara Digital	Indeks SPBE	3,00	3,00
		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,35	2,35
		Meningkatnya Pengamanan Sistem Elektronik dan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	47%	47%

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka disusun program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang akan dicapai, dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Relasi Media
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
				Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
				Pelayanan Informasi Publik
				Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
				Diseminasi Informasi
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
				Penyusunan Konten
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
2.	Indeks SPBE	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
			Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
				Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
				Penyelenggaraan Jaringan Intra

				Pemerintah Daerah Kab/Kota
				Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
				Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
				Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
				Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah
				Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
				Penyediaan Akses Internet
				Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
				Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
3	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektor Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Statistik Sektor
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor
				Koordinasi dan Kolaborasi Dalam

				<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral</i>
4	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>
				<i>Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan</i>
				<i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</i>
				<i>Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</i>

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2026 program dan kegiatan telah mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024 Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mempunyai beberapa program mengacu pada RENSTRA Dinas Kominfo Tahun 2025-2029 diantaranya:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- 2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Untuk Menunjang program-program diatas, Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa kegiatan-kegiatan dan sub-sub kegiatan untuk Tahun 2026 yaitu:

1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4) Pengadaan Mebel 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Sub Kegiatan :	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	1) Relasi Media 2) Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 3) Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 4) Pelayanan Informasi Publik 5) Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 6) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 7) Diseminasi Informasi 8) Pengelolaan Media Komunikasi Publik 9) Penyusunan Strategi Komunikasi Publik 10) Penyusunan Konten 11) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
9.	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	1) Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
10.	Kegiatan Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	1) Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional 2) Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE

		3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 4) Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi 5) Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 6) Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 7) Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 8) Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 9) Penyediaan Akses Internet 10) Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 11) Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 12) Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
11.	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	1) Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 3) Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral
12.	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan :	1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2) Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan

		3) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 4) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
--	--	---

4.2 Rumusan Rencana Pendanaan

Program / kegiatan akan berjalan sesuai tujuan dan sasaran dengan dukungan dalam penganggaran. Pendanaan pada setiap program / kegiatan berdasarkan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai. Adapun Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	80	10.183.094.149	84	10.188.094.149
		Nilai IKM	82		84	
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	100%		100%	
X.XX.01.2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen/Laporan	115.000.000	11 Dokumen/Laporan	115.000.000
X.XX.01.2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
X.XX.01.2.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	50.000.000
X.XX.01.2.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	35.000.000	4 Laporan	35.000.000
X.XX.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	100%	4.273.594.149	100%	4.278.594.149
X.XX.01.2.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	3.938.594.149	35 Orang/Bulan	3.943.594.149
X.XX.01.2.0 002	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	250.000.000	12 Dokumen	250.000.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
X.XX.01.2.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	45.000.000	2 Laporan	45.000.000
X.XX.01.2.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000
X.XX.01.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Kepegawaina Perangkat Daerah	100%	235.000.000	100%	235.000.000
X.XX.01.2.002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	60 Paket	150.000.000	60 Paket	150.000.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
X.XX.01.2.0 003	<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	3 Dokumen	35.000.000	3 Dokumen	35.000.000
X.XX.01.2.0 009	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	10 Orang	50.000.000	10 Orang	50.000.000
X.XX.01.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berjalannya Pelayanan Administrasi perkantoran dengan lancar (rata-rata bulan), Kinerja Perangkat Daerah dan Keuangan	100%	1.185.000.000	100%	1.185.000.000
X.XX.01.2.0 001	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	8 Paket	5.000.000	8 Paket	5.000.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
X.XX.01.2.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	100.000.000	50 Paket	100.000.000
X.XX.01.2.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	2 Paket	25.000.000
X.XX.01.2.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	20.000.000	8 Paket	20.000.000
X.XX.01.2.0 006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	5.000.000	7 Dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.000.000.000
X.XX.01.2.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.000.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
X.XX.01.2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.410.000.000	100%	3.410.000.000
X.XX.01.2.0 001	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	2 Unit	1.000.000.000	2 Unit	1.000.000.000
X.XX.01.2.0 002	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	5 Unit	1.500.000.000	5 Unit	1.500.000.000
X.XX.01.2.0 006	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	15 Unit	250.000.000	15 Unit	250.000.000
X.XX.01.2.0 005	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	25 Unit	60.000.000	25 Unit	60.000.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
X.XX.01.2.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000
X.XX.01.2.0 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000
X.XX.01.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	164.500.000	36 Laporan	164.500.000
X.XX.01.2.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.500.000	12 Laporan	4.500.000
X.XX.01.2.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
X.XX.01.2.003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	40.000.000
X.XX.01.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	100%	800.000.000	100%	800.000.000
X.XX.01.2.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	250.000.000	20 Unit	250.000.000
X.XX.01.2.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	50.000.000	30 Unit	50.000.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
X.XX.01.2.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAANINFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	72%	10.949.070.000	74%	10.447.327.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi, Telekomunikasi dan opini publik	4 Media/Jumlah Aduan/Lembaga penyiaran/Berita/DIP	10.949.070.000	4 Media/Jumlah Aduan/Lembaga penyiaran/Berita/DIP	10.447.327.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	4 Laporan	8.886.550.000	4 Laporan	5.886.550.000
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas	85.000.000	20 Komunitas	120.000.000
2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	4 Laporan	197.520.000	4 Laporan	1.900.777.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Pemohon	110.000.000	5 Pemohon	110.000.000
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	62%	250.000.000	68%	300.000.000
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	4 rekom	120.000.000	4 rekom	120.000.000
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	76%	700.000.000	78%	700.000.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media	150.000.000	3 Media	440.000.000
2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	-	-	2 Dokumen	300.000.000
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	550 Konten	350.000.000	650 Konten	450.000.000
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	8 Orang	100.000.000	12 Orang	120.000.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	3,00	8.838.050.000	3,05	8.873.150.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
III.9	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Domain dan Sub Domain - Tersedianya Jaringan Komunikasi Data dan Bandwith	44 OPD/Kelurahan/Aplikasi	3.500.000.000	44 OPD/Kelurahan/Aplikasi	3.500.000.000
2.16.03.2.01.0004	<i>Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa</i>	1 Dokumen	3.500.000.000	1 Dokumen	3.500.000.000
III.10	Pengelolaan e-government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pusat Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Portal Perangkat Daerah	44 OPD/Menara/Kecamatan/Aplikasi	5.338.050.000	44 OPD/Menara/Kecamatan/Aplikasi	5.373.150.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	5 Aplikasi	125.000.000	5 Aplikasi	125.000.000
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	70.000.000
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	44 Perangkat Daerah	3.000.000.000	44 Perangkat Daerah	3.000.000.000
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan,	44 Layanan	99.100.000	44 Layanan	99.100.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
		<i>dan/atau Portal Data Nasional</i>				
2.16.03.2.02.0026	<i>Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo</i>	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo</i>	44 Dokumen	22.100.000	44 Dokumen	22.200.000
2.16.03.2.02.0032	<i>Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan</i>	<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan</i>	1 Aplikasi	200.000.000	1 Aplikasi	200.000.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
	<i>Aplikasi Umum SPBE</i>	<i>pengembangan aplikasi SPBE</i>				
2.16.03.2.02.0033	<i>Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali</i>	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.000.000
2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	125.000.000
2.16.03.2.02.0036	<i>Penyediaan Akses Internet</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas</i>	44 Perangkat Daerah	600.000.000	44 Perangkat Daerah	625.000.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	5 Unit	15.000.000	15 Unit	25.000.000
2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	46.850.000	1 Dokumen	46.850.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,35	140.000.000	2,35	175.000.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
2.20.02.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Penyelenggara Statistik Sektoral	44 OPD	140.000.000	44 OPD	175.000.000
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	86%	55.000.000	90%	60.000.000
2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	3 Orang	45.000.000	5 Orang	75.000.000
2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sistem Persandian	47%	1.075.000.000	54%	1.085.000.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pemerintahan yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	47%	1.075.000.000	54%	1.085.000.000
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	31 Laporan	250.000.000	31 Laporan	250.000.000
2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000
2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan	16 Perangkat Daerah	750.000.000	24 Perangkat Daerah	750.000.000

KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)				
			2026		2027	
			Target	Rp	Target	Rp
3	4	5	9	10	11	12
		Informasi dan Persandian				
2.21.02.2.01 .0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	60.000.000
JUMLAH				31.185.214.149		30.768.571.149

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (RANCANGAN RENJA) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2026 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholders* terutama bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 sangat ditentukan oleh kesiapan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rancangan Renja 2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Hal-hal yang dapat dilakukan pada saat evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah target dan indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, aturan perundang-undangan dan tanpa mengubah tujuan dari tema pembangunan yang mengacu pada RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026.

Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 harus benar-benar menjadi acuan kerja bagi bidang-bidang dan sub bidang secara khusus dan Dinas Komunikasi dan Informatika pada umumnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua dapat melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, kredibel dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) Diskominfo dan kinerja pegawainya.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rancangan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan komunikasi dan informatika yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Kuala Tungkal, 28 November 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



JOAN PRAYUDA, SE., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
19810829 201001 1 010